

## **Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Eko Budiarmo \***

**<sup>1</sup>Universitas Mataram, Indonesia**

*\*Corresponding author email: [ekobudiaros123@gmail.com](mailto:ekobudiaros123@gmail.com)*

---

### **Article Info**

*Article history:*

Received Month 13, 2026

Revised Month 28, 2026

---

### **ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan ABK terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kinerja perangkat daerah, serta akuntabilitas publik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis data anggaran dan kinerja satuan kerja pemerintah daerah, didukung oleh survei serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ABK berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, yang ditandai dengan peningkatan capaian program, efisiensi penggunaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Namun demikian, implementasi ABK masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman sumber daya manusia, sistem informasi yang belum optimal, serta lemahnya pengukuran kinerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnakan indikator kinerja, serta dukungan teknologi merupakan faktor penting untuk memaksimalkan efektivitas penerapan ABK dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Keywords:** Anggaran berbasis kinerja, Pengelolaan keuangan daerah, Efektivitas

---

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



---

**How to cite:** Example: Budiarmo, E.(2026). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Indonesian Journal of Educational Research and Evaluation Global*, 2(1), 109–116 <https://doi.org/10.55681/ijereg.v1i1.181>

---

### **PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, manajemen keuangan daerah dituntut untuk lebih transparan, efisien, efektif, serta akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara. Namun, problematika umum yang masih sering muncul adalah kurang optimalnya pemanfaatan anggaran, adanya pemborosan (*wasteful spending*), serta masih kuatnya budaya anggaran berorientasi input, bukan output atau kinerja yang dicapai (Mahmudi, 2019).

Sebagai upaya reformasi dalam tata kelola keuangan, pemerintah Indonesia memperkenalkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) melalui berbagai peraturan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ABK merupakan sistem penganggaran yang mengaitkan alokasi anggaran dengan capaian kinerja berupa indikator output dan outcome, sehingga anggaran tidak hanya digunakan sebagai alat administratif melainkan juga sebagai instrumen untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Bastian, 2018). Dengan demikian, keberhasilan penggunaan anggaran tidak lagi diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari kualitas hasil yang dicapai.

Penerapan ABK diharapkan dapat memperbaiki efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang selama ini cenderung hanya menekankan pertanggungjawaban administrasi. Mardiasmo (2020) menyatakan bahwa efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup keberhasilan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan cara yang tepat sasaran, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui ABK, pemerintah daerah didorong untuk menyusun anggaran berdasarkan analisis kebutuhan, target kinerja terukur, dan evaluasi hasil program secara berkala.

Namun dalam implementasinya, penerapan ABK tidak selalu berjalan mulus. Masih ditemukan perangkat daerah yang kurang memahami penyusunan indikator kinerja yang baik, lemahnya sistem informasi kinerja, hingga minimnya budaya evaluasi di lingkungan pemerintahan daerah (Wicaksono, 2022). Selain itu, orientasi sebagian aparatur terhadap output administratif masih mendominasi, sehingga penyusunan anggaran seringkali tidak sepenuhnya berbasis analisis manfaat. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas pengelolaan keuangan daerah meskipun secara formal telah menerapkan ABK.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menyangkut bagaimana anggaran dikelola, tetapi juga bagaimana hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Jika anggaran hanya habis, tetapi pembangunan tidak memberikan perubahan yang signifikan, maka tujuan ABK belum tercapai. Hal ini sejalan dengan konsep *value for money* yang menekankan bahwa anggaran publik harus memberikan nilai manfaat yang tinggi bagi publik melalui prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Halim & Kusufi, 2021). Oleh karena itu, penerapan ABK harus benar-benar diterjemahkan ke dalam sistem dan praktik manajemen kinerja secara konsisten.

Dalam perspektif akuntabilitas, ABK berperan besar dalam meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dan hasil pembangunan daerah. Pemerintah wajib membuka hasil capaian program dan penggunaan anggaran kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (Mahsun, 2018). Keterbukaan ini diharapkan dapat memberikan

ruang pengawasan publik yang lebih luas sehingga potensi korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah dapat diminimalisasi. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan ABK memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, studi oleh Sari dan Nugroho (2020) menyimpulkan bahwa perangkat daerah yang menerapkan indikator kinerja yang terukur mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara signifikan. Selain itu, Putri (2021) menemukan bahwa penggunaan ABK mendorong alokasi anggaran yang lebih rasional dan berorientasi pada prioritas pembangunan daerah.

Namun demikian, keberhasilan penerapan ABK sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelola anggaran. Tanpa pemahaman mendalam terhadap analisis kinerja, aparatur hanya akan mengisi indikator kinerja sebagai formalitas tanpa dimanfaatkan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan (Arifin, 2022). Selain itu, keberadaan sistem informasi kinerja yang handal sangat dibutuhkan untuk memantau capaian secara real time dan memberikan data akurat untuk evaluasi berkelanjutan.

Tantangan lain yang masih sering ditemui adalah lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga sering terjadi tumpang tindih anggaran. Perencanaan program terkadang masih dilakukan secara sektoral tanpa mempertimbangkan keselarasan dengan tujuan strategis daerah (Nurmala, 2020). Akibatnya, efektivitas pencapaian target pembangunan daerah menjadi kurang optimal.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa strategi seperti penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas data dan sistem monitoring kinerja, serta memperkuat budaya evaluasi dalam organisasi pemerintahan. Selain itu, peran legislatif dan masyarakat dalam pengawasan anggaran harus diperkuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian di atas, penerapan Anggaran Berbasis Kinerja memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi keberhasilannya membutuhkan dukungan berbagai faktor pendukung. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh penerapan ABK terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik dalam pengembangan ilmu manajemen keuangan publik, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi pemerintah daerah sebagai dasar perbaikan kebijakan dan implementasi ABK di lapangan. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah merupakan tujuan besar yang harus dicapai untuk menjamin bahwa uang rakyat benar-benar digunakan bagi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, transformasi dari anggaran tradisional menuju anggaran berbasis kinerja menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih responsif, kompeten, dan berintegritas.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran hubungan sebab-akibat secara objektif berdasarkan data numerik yang dapat diukur secara statistik (Sugiyono, 2021). Jenis penelitian adalah penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen melalui pengujian hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Creswell, 2018).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (X), yang diukur melalui beberapa indikator seperti penyusunan indikator kinerja, konsistensi perencanaan dengan anggaran, mekanisme pelaporan kinerja, dan pelaksanaan evaluasi kinerja (Mahmudi, 2019). Sedangkan variabel dependen adalah efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y), yang dinilai berdasarkan prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah (Halim & Kusufi, 2021).

Lokasi penelitian dilakukan pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menjadi objek studi, dengan populasi berupa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu seperti pejabat atau aparatur yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, sehingga dianggap mampu memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian (Mardiasmo, 2020). Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin atau pertimbangan peneliti sesuai keterwakilan populasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert 1–5 untuk mengukur persepsi responden terhadap setiap indikator variabel penelitian. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dokumen anggaran, laporan realisasi anggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah (Bastian, 2018). Teknik ini mendukung validitas data sehingga hasil penelitian dapat dianalisis lebih komprehensif. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji kualitas instrumen berupa uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kuesioner telah layak digunakan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh penerapan ABK terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Seluruh pengujian statistik dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) sebagai dasar penarikan kesimpulan hasil penelitian (Ghozali, 2020). Melalui metode tersebut, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan bukti empiris mengenai efektivitas implementasi ABK serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan melalui kuesioner kepada aparatur pemerintah daerah serta analisis dokumen menunjukkan bahwa implementasi ABK memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pembahasan hasil penelitian ini akan difokuskan pada empat aspek utama yang menjadi indikator efektivitas

pengelolaan anggaran, yaitu: keselarasan perencanaan dan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya keuangan, akuntabilitas pelaporan anggaran, serta pencapaian kinerja pembangunan daerah.

### **1. Penguatan Keselarasan antara Perencanaan dan Anggaran**

Salah satu karakteristik utama ABK adalah adanya keterkaitan erat antara dokumen perencanaan dengan penyusunan anggaran. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat daerah yang menerapkan indikator kinerja secara jelas cenderung memiliki konsistensi yang lebih baik antara kegiatan yang direncanakan dan anggaran yang dialokasikan. Hal ini mendukung pendapat Mardiasmo (2020) bahwa ABK membantu pemerintah dalam mengalokasikan dana berdasarkan target kinerja yang ingin dicapai, bukan sekadar mengikuti pola anggaran tahun sebelumnya (*incremental budgeting*).

Dalam praktiknya, setiap program pemerintah daerah kini harus dilengkapi dengan indikator output dan outcome yang terukur. Dengan adanya indikator ini, proses verifikasi anggaran menjadi lebih ketat sehingga mengurangi peluang kegiatan yang tidak mendukung tujuan pembangunan untuk tetap dianggarkan (Wicaksono, 2022). Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa perangkat daerah lebih disiplin dalam melakukan budget review sehingga terjadi peningkatan kualitas perencanaan berbasis analisis kebutuhan riil masyarakat. Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa penyusunan indikator kinerja yang terlalu administratif dan belum menggambarkan dampak nyata bagi masyarakat (*impact-oriented*). Hal ini sejalan dengan studi Putri (2021) yang menyatakan bahwa sebagian besar indikator kinerja pemerintah daerah masih menekankan output fisik dan belum mengukur outcome jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun konsistensi perencanaan-anggaran meningkat, efektivitas dalam pencapaian manfaat pembangunan masih perlu diperkuat melalui penyempurnaan indikator kinerja.

### **2. Efisiensi dan Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran**

Penerapan ABK memberikan dampak positif pada peningkatan efisiensi penggunaan anggaran. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel penerapan ABK berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pelaksanaan anggaran daerah. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan rasio efektivitas belanja publik dan penurunan kegiatan yang tidak memiliki manfaat jelas bagi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan konsep *value for money* yang menekankan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran sektor publik (Halim & Kusufi, 2021).

Sebagai contoh, melalui mekanisme evaluasi kinerja, beberapa kegiatan yang dianggap tidak produktif berhasil dieliminasi dan dialokasikan kembali ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur layanan dasar. Dampaknya, pembangunan daerah menjadi lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat lokal. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat kasus belanja perangkat daerah yang cenderung fokus pada penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran, yang mengindikasikan bahwa budaya administrasi masih cukup kuat. Hal ini menguatkan temuan Arifin (2022) bahwa penerapan ABK belum sepenuhnya mengubah orientasi pegawai terhadap kinerja, sehingga efisiensi anggaran dapat terhambat apabila evaluasi dilakukan sekadar sebagai formalitas tanpa tindak lanjut perbaikan.

### **3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas merupakan salah satu tujuan utama dari implementasi ABK dalam reformasi keuangan daerah. Hasil penelitian memperlihatkan peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini karena perangkat daerah kini wajib melaporkan tidak hanya output kegiatan, tetapi juga capaian kinerja yang menjadi dasar pertanggungjawaban publik (Mahsun, 2018).

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dan sistem informasi keuangan daerah yang semakin baik turut mendukung peningkatan keterbukaan informasi anggaran. Pemerintah dapat memberikan akses publik melalui media daring, publikasi laporan kinerja, serta forum konsultasi perencanaan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pajak dan sumber daya daerah digunakan untuk mendukung pembangunan.

Meski demikian, beberapa responden menyampaikan bahwa sistem informasi kinerja belum sepenuhnya terintegrasi antar-perangkat daerah, sehingga proses pelaporan kinerja masih memerlukan konsolidasi manual yang memperlambat proses evaluasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur teknologi serta peningkatan kapabilitas aparatur dalam memanfaatkan sistem informasi secara optimal (Sari & Nugroho, 2020).

### **4. Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan ABK berdampak pada peningkatan kualitas pencapaian program pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah dibandingkan tahun-tahun sebelum penerapan ABK dilakukan secara optimal. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Bastian (2018) yang menunjukkan bahwa ABK dapat mempercepat pencapaian output dan outcome pembangunan apabila diterapkan secara konsisten.

Perubahan penting yang terlihat adalah meningkatnya keterkaitan antara hasil evaluasi kinerja dengan proses penganggaran tahun berikutnya. Kegiatan yang kinerjanya buruk dapat dikurangi atau dihentikan, sementara program dengan dampak besar akan mendapatkan prioritas alokasi. Dengan demikian, ABK mendorong terjadinya siklus perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pembangunan daerah.

Walaupun demikian, terdapat faktor-faktor penghambat yang masih perlu diperbaiki:

- Kapasitas SDM dalam analisis data kinerja masih terbatas
- Masih terdapat ketergantungan pada pola anggaran historis
- Tidak semua OPD memiliki budaya pengelolaan berbasis evaluasi
- Keselarasan antara target kinerja daerah dan kinerja OPD belum sepenuhnya terjaga

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa meskipun penerapan ABK memiliki dampak positif, proses transformasi manajemen publik menuju budaya kinerja masih memerlukan waktu dan upaya berkelanjutan.

### **5. Sinergi Regulasi dan Kepemimpinan dalam Keberhasilan ABK**

Keberhasilan penerapan ABK terbukti dipengaruhi oleh adanya komitmen pimpinan daerah dalam mendorong reformasi keuangan. Pemerintah daerah yang memiliki visi kuat dalam akuntabilitas publik cenderung menerapkan sistem evaluasi yang lebih ketat terhadap program dan kegiatan OPD. Sebaliknya, daerah yang lemahnya kontrol internal memiliki efektivitas penerapan ABK yang lebih rendah.

Hal tersebut sejalan dengan Mahmudi (2019) yang menegaskan bahwa implementasi ABK lebih banyak bergantung pada faktor institusional dan budaya organisasi dibanding sekadar ketersediaan aturan formal. Regulasi nasional seperti UU No. 17/2003 dan PP No. 12/2019 memberikan kerangka hukum yang jelas, namun pelaksanaan di tingkat teknis memerlukan kepemimpinan yang mendorong inovasi dan integritas.

## KESIMPULAN

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan salah satu strategi utama reformasi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan ABK memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pengaruh tersebut terlihat dari adanya peningkatan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, optimalisasi pemanfaatan anggaran, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah.

Perubahan orientasi dari input-based budgeting menuju performance-based budgeting menjadikan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan belanja, tetapi dari manfaat nyata yang diberikan bagi masyarakat. Dengan demikian, ABK berperan dalam memperkuat prinsip value for money yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam setiap aktivitas pembangunan yang menggunakan anggaran publik. Selain itu, peningkatan akuntabilitas publik turut terwujud melalui keterbukaan informasi keuangan dan kinerja pemerintah yang semakin baik.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa implementasi ABK masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, penyusunan indikator kinerja yang belum sepenuhnya outcome-oriented, serta keterbatasan sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi. Tantangan budaya organisasi juga ditemukan, khususnya pada orientasi sebagian aparatur yang masih lebih berfokus pada administratif daripada pencapaian kinerja. Oleh karena itu, keberhasilan ABK sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan daerah, konsistensi pelaksanaan evaluasi, penguatan sistem informasi, dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Reformasi penganggaran membutuhkan proses transformasi yang berkelanjutan, sehingga setiap tahun penerapannya harus terus dievaluasi dan disempurnakan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2022). *Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Bastian, I. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2021). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Ed. Revisi)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik (Ed. 3)*. Yogyakarta: Andi.
- Nurmala, D. (2020). Koordinasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Penganggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 115–128.
- Putri, S. D. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Keuangan Publik*, 9(1), 55–70.
- Sari, R., & Nugroho, A. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Kinerja terhadap Kualitas Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Reformasi Birokrasi*, 7(3), 211–223.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, B. (2022). Tantangan Penerapan Performance-Based Budgeting pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 72–84.